

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN PURNAMARTA
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 1000261

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	462.000.000
1. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000		
2. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 297.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	343.000.000
1. MOBIL, KIA RIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z Tahun 2005, LAINNYA Rp. 3.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	37.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	250.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	178.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.270.200.000
III. HUTANG	Rp.	131.147.636
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.139.052.364

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.